

## Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Anggaran Pada Kantor Camat Waigete

**Matilda Arnista Ja'o**  
Universitas Nusa Nipa

**Andreas Rengga**  
Universitas Nusa Nipa

**Elisabet Luju**  
Universitas Nusa Nipa

Korespondensi Penulis: [arnistajao2001@gmail.com](mailto:arnistajao2001@gmail.com)

**Abstract.** *This study aimed to determine the financial and budget administration management at Waigete Sub-District Office, Sikka Regency. This study was a descriptive qualitative and employed a case study design. The technique of analysis employed in this research was descriptive analysis consisting of collecting and filtering information thoroughly and in detail, then it was elaborated to obtain a clear description. Data was collected using observation, documentation, and interviews. Based on the results of the study, it was concluded that the management of financial and budget administration at the Waigete sub-district office starting from planning, budgeting, implementation, and administration were good while the issues were in reporting and accountability for budget implementation. They were not optimal due to the lack of human resources quality (HR) who had accrual-based abilities or skills in utilizing existing information technology and delays or time mismatches in annual financial reporting. The delay in question was regarding the delay in the completeness of official travel report receipts used as transaction evidence to make accountability letters. Thus, the quantity of acceleration of programs and the submission of accountability reports was not optimal.*

**Keywords:** *Management, Financial Administration, Budget.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran pada kantor Camat Waigete Kabupaten Sikka. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu dengan langkah-langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Jenis pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran pada kantor Camat Waigete mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan tidak mengalami masalah sedangkan yang bermasalah adalah pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada kantor Camat Waigete yang belum optimal disebabkan oleh kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan atau keterampilan berbasis akrual dalam pemanfaatan teknologi informasi yang sudah ada dan keterlambatan atau ketidak sesuaian waktu dalam pelaporan keuangan setiap tahun. Keterlambatan yang dimaksud adalah keterlambatan dalam kelengkapan kwitansi laporan perjalanan dinas yang digunakan untuk membuat bukti transaksi untuk membuat surat pertanggungjawaban. Sehingga, secara kuantitas percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang belum optimal.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan, Administrasi Keuangan, Anggaran*

## **LATAR BELAKANG**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan diterapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang NO. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut telah memberikan wewenang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud antara lain adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah meliputi pengelolaan terhadap pendapatan, belanja dan asset daerah. Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kaitannya dengan baik atau buruknya keuangan daerah pada dasarnya tergantung pada pengelolannya (Rukmini *et al.*, 2022:119).

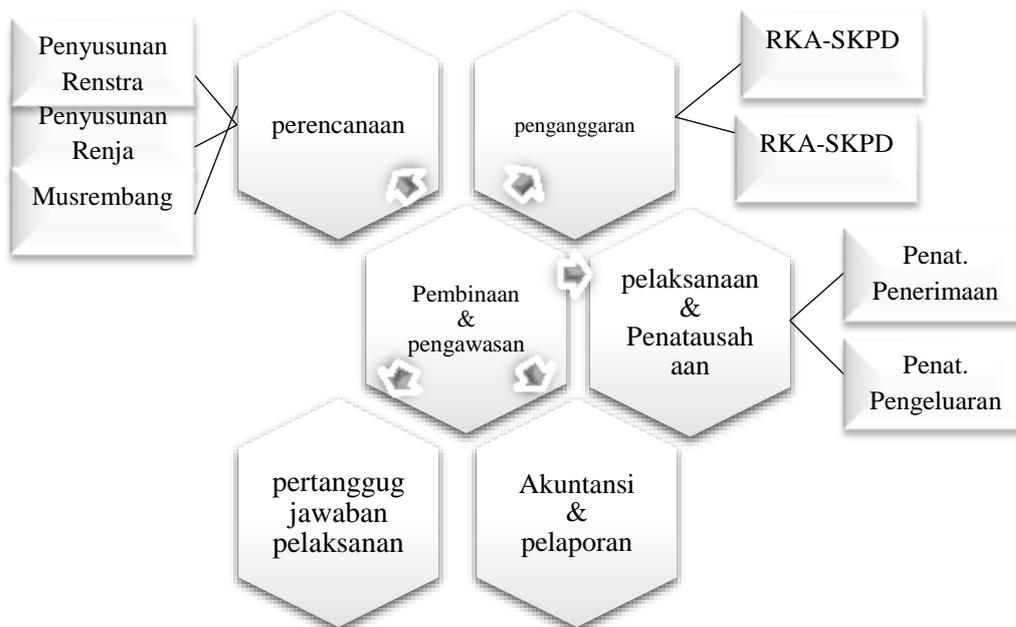
Pegelolaaan administrasi keuangan yang baik memegang peran penting sebagai bukti atas terlaksananya suatu kegiatan ekonomi. Sehingga, pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan dengan saksama agar tidak terjadi kekeliruan. Instansi pemerintah memerlukan sumber daya yang memadai untuk mengelola administrasi keuangan. Agar semua dapat tercapai, perlu ada perencanaan sehingga tujuan pengelolaan administrasi keuangan dapat tercapai secara optimal. Adanya pengelolaan keuangan yang baik dan teratur mendorong ke arah perbaikan ekonomi, serta dapat menyalurkan pendapatan tepat pada sasaran. Menurut Purba *et al.*, (2021: 144) pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Pengelolaan keuangan adalah teknik mengimbangi gaya hidup manusia seperti gaya hidup konsumtif dengan gaya hidup produktif seperti investasi, menabung ataupun bisnis.

Arti pengelolaan keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana dari perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen umum untuk sumber daya keuangan. Pengertian pengelolaan keuangan adalah segala bentuk kegiatan administrative yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban (pelaporan) terhadap siklus ke luar masuknya dana atau uang dalam sebuah instansi pada kurun waktu tertentu.

Kantor Camat Waigete merupakan salah satu instansi pemerintah yang menjalankan keseluruhan aspek kegiatan administrasi yang sesuai dengan prosedur dan wewenang yang berlaku. Sebuah instansi akan maju apabila administrasinya tertata dengan baik sehingga dalam penyelenggaran sebuah laporan bisa berjalan secara efektif, dari keseluruhan keuangan yang menjadi bahan pertimbangan dalam sebuah pelaporan dan sebagai jalannya pembangunan sebuah organisasi.

Pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan di kantor Camat Waigete, agar anggaran ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Pengelolaan dalam sebuah perkantoran sangat memerlukan administrasi dan keuangan yang dapat menunjang sebuah perkantoran maupun usaha yang dikelolanya. Dalam kaitannya dengan penetapan anggaran tidak terlepas dari biaya-biaya yang berhubungan dengan program yang akan dilakukan oleh kantor Camat Waigete. Semua program membutuhkan biaya untuk menunjang program dari kantor Camat Waigete, untuk itu dibutuhkan pengalokasian biaya yang benar agar menghasilkan anggaran yang sesuai untuk kebutuhan tersebut.

Arah kebijakan penerapan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada gambar siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 sebagai berikut:



Gambar 1.1 Siklus pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan tidak mengalami masalah sedangkan yang bermasalah adalah pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di kantor Camat Waigete yang belum optimal disebabkan oleh kurangnya Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan atau keterampilan berbasis aktual dalam pemanfaatan teknologi informasi yang sudah ada dan keterlambatan atau ketidak sesuaian waktu dalam pelaporan keuangan setiap tahun. Keterlambatan yang dimaksud kurang lebih 1 bulan disebabkan keterlambatan kelengkapan kwitansi laporan perjalanan dinas yang digunakan untuk membuat bukti transaksi untuk membuat surat pertanggungjawaban.

## KAJIAN TEORITIS

### Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut Kasmir (2010:5) Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Selanjutnya menurut Sutrisno (2012:3) Manajemen keuangan yaitu semua aktivitas usaha yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan menghasilkan dana tersebut secara efisien. Sedangkan Menurut Fahmi (2014:2) manajemen keuangan

merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana seseorang manajer keuangan dengan menggunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability (keberlanjutan) usaha bagi perusahaan.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan pengertian manajemen keuangan adalah sebuah ilmu dan seni yang mengkaji kegiatan perusahaan dalam rangka perolehan, pendanaan dan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan dalam usaha untuk mengelola keuangan perusahaan sehingga mendapatkan hasil secara efisien dan efektif dengan menggunakan ilmu-ilmu terkait.

### **Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pemerintah daerah ini merupakan penyatuan laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada pemerintah yang disesuaikan dengan kerangka konsep yang ada pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 paragraf 24 yang mana penyusunannya diperuntukan ketersediaan informasi yang relevan berkenaan dengan posisi keuangan serta keseluruhan transaksi yang dilakukan perusahaan yang memberikan laporan keuangan pada periode yang telah ditentukan.

Menurut Sinurat (2018:117) bahwa Laporan keuangan adalah laporan terstruktur yang berisikan terkait posisi keuangan dan juga sejumlah transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Laporan keuangan ini memiliki tujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan menurut Gumanti (2011:103) laporan keuangan adalah laporan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang isinya merupakan ringkasan dari harta, kewajiban, dan kinerja operasi selama suatu periode akuntansi tertentu.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan laporan keuangan adalah laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berisi informasi tentang kinerja suatu perusahaan.

### **Pengertian Pengelolaan Keuangan**

Pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu: “pengelolaan

keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Secara harafiah pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi dan modal. Sehingga dapat disimpulkan manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana sebaik mungkin hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan (Armereo *et al.*, 2020:1).

### **Pengertian Administrasi Keuangan**

Menurut Gie (2009:10) Pengertian administrasi keuangan adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan/ organisasi. Dengan kata lain, administrasi keuangan merupakan kegiatan penataan keuangan, yang mencakup penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber dana, cara pemakaian, hingga pembukuan. Administrasi keuangan arti sempit adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan dan pemasukan serta pengeluaran untuk membiayai berbagai kegiatan organisasi, dalam bentuk berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan dan administrasi keuangan arti luas adalah kebijakan mengenai pengadaan serta penggunaan keuangan organisasi dalam mewujudkan kegiatan organisasi itu sendiri, dimana bentuknya berupa pengolahan keuangan meliputi perencanaan dan pengaturan serta pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.

### **Pengertian Anggaran**

Menurut Rangga *et al.*, (2020:204) Penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya, karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah. Menurut Raharjaputra (2011:134) definisi dari anggaran banyak dikemukakan oleh para ahli manajemen, tetapi intinya adalah hampir sama, diantaranya adalah suatu perencanaan keuangan dan operasional perusahaan yang menyeluruh dan mendetail tentang memperoleh dana menggunakannya secara efisien dan efektif dalam suatu periode tertentu.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu dengan langkah-langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Jenis pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Administrasi Keuangan**

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Proses pengelolaan administrasi keuangan yang dilakukan oleh bagian keuangan diantaranya adalah pencatatan transaksi/kejadian keuangan, input data keuangan, pengeluaran serta pembuatan laporan keuangan. proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses perencanaan, yang meliputi musrembang, renstra, renja, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana kerja anggaran. Proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan tidak mengalami masalah sehingga dapat membantu pengelolaan keuangan yang berbasis akrual efisien, efektif, dan sistematis. Sedangkan yang bermasalah adalah pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di kecamatan Waigete yang belum optimal di sebabkan kurangnya kualitas SDM yang memiliki kemampuan atau keterampilan berbasis akrual dalam pemanfaatan teknologi informasi yang sudah ada dan ketidaksesuaian waktu dalam pelaporan keuangan setiap tahun.

Pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Camat Waigete melewati beberapa prosedur sebagai berikut:

#### **1. Perencanaan dan Penganggaran**

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Proses perencanaan dan penganggaran pada kantor Camat Waigete berdasarkan kebutuhan kegiatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang), Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), dokumen pelaksanaan anggaran, rencana kerja anggaran mulai dari tingkat Desa, kelurahan, kecamatan serta tingkat Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran keuangan pada kantor Camat Waigete yaitu Camat selaku pengguna anggaran, sekretaris camat, PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan - Satuan Kerja Perangkat Daerah), bendahara barang dan bendahara.

## **2. Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan penggunaan anggaran pada kantor Camat Waigete yaitu Perencanaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sehingga dari DPA itu menjadi acuan dalam rangka menjalankan program dan kegiatan yang berhubungan dengan bendaharaan dan biaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran tidak dapat dipublikasikan, kecuali melalui mekanisme perubahan anggaran dan mempertanggungjawabkan keuangan itu tidak secara langsung tetapi mengikuti jalurnya kepada pemerintah daerah.

## **3. Pencairan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan yang terlibat dalam mengurus pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Camat Waigete yaitu bendahara, bendahara pembantu dan Kasubag Program dan Keuangan atau di sebut Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mulai dari penginputan SPJ, Pembuatan Surat Pertanggung jawaban administratif dan fungsional, Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sehingga dapat mencairkan dana kecamatan.

## **4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dari perangkat daerah direkap/dikomplikasi ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menjadi laporan keuangan akhir tahun anggaran yang disampaikan Bupati Kepada DPRD melalui Sidang DPRD sebagai representasi masyarakat. Jadi semua dana dipublikasikan ke

masyarakat tetapi tidak secara langsung hanya lewat DPRD di saat semuanya terkumpul menjadi laporan kerja Bupati akhir tahun.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Camat Waigete melewati beberapa prosedur dimulai dengan perencanaan yang meliputi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrebang), Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana kerja anggaran (RKA), Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), pengumpulan surat pertanggungjawaban (SPJ) dan menginputnya ke Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) lalu membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) Administratif dan Fungsional, kemudian pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu membuat Surat Permintaan Membayar (SPM) dan diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk di buat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang menjadi dasar pencairan dana kantor Camat Waigete, kemudian membuat laporan akhir tahun berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual.
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran pada kantor Camat Waigete mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan tidak mengalami masalah sedangkan yang bermasalah adalah pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada kantor Camat Waigete yang belum optimal disebabkan oleh kurangnya kuaalitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan atau keterampilan berbasis akrual dalam pemanfaatan teknologi informasi yang sudah ada dan keterlambatan atau ketidak sesuaian waktu dalam pelaporan keuangan setiap tahun. Keterlambatan yang dimaksud adalah keterlambatan dalam kelengkapan kwitansi laporan perjalanan dinas yang digunakan untuk membuat bukti transaksi untuk membuat surat pertanggungjawaban. Sehingga secara kuantitas percepatan pelaksanaan kegiatan

dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang belum optimal.

## **SARAN**

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi:

1. kantor Camat Waigete
  - a. Perlu adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan atau keterampilan yang berbasis aktual dalam pemanfaatan teknologi informasi yang sudah ada. Sumber daya manusia ini dapat diperoleh melalui penerimaan pegawai dengan kualifikasi dibidang akuntansi yang memadai serta mengikuti pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis untuk pegawai (SDM).
  - b. Agar kedepannya lebih tertib lagi dalam kelengkapan kwitansi laporan perjalanan dinas yang digunakan untuk membuat bukti transaksi untuk membuat surat pertanggungjawaban sehingga ketrelambatan atau ketidak sesuaian waktu dalam pelaporan keuangan setiap tahun dapat terjaga.
2. Peneliti Selanjutnya
  - a. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam lagi dalam mengumpulkan data-data melalui wawancara untuk mengetahui proses pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan.
  - b. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian, diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan data, pengumpulan data dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
  - c. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian, untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun refrensi yang terkait dengan proses pengelolaan administrasi keuangan agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.
  - d. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran pada kantor Camat Waigete. Khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang administrasi keuangan.

## REFERENSI

- \_\_\_\_\_. (2003). *Studi tentang ilmu administrasi*. Bandung: Sinar Baru Aglensindo.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Analisis manajemen keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Abdurrahman, J. (2018). Sistem pengelolaan kinerja keuangan dan administrasi di Kantor Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 1(1), 1-14. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Armereo, C., Marzuki, A., & Seto, A. A. (2020). *Manajemen keuangan*. Jakarta: Nusa Litera Inspirasi
- Astuty, E. A. (2019). *Pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan peran perangkat Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi empiris pada desa se-Kecamatan Muntilan: Skripsi tidak diterbitkan*. Magelang: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Atmosudirjo, P. (2000). *Administrasi dan manajemen umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bahar, A. (2018). Analisis pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Kecamatan Mappakasunggu. *Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. 2(1), 22-37. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Bere, M. F. H. (2018). *Pengelolaan anggaran belanja pengadaan barang/jasa pada kantor wilayah direktorat jenderal kekayaan negara kementerian keuangan Provinsi Sulawesi Selatan: Skripsi tidak diterbitkan*. Makassar: Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Bungin, B. (2015). *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erfianingtyas, N., Utomo, S. W., & Sulistyowati, N. W. (2022). Mengupas praktik pengelolaan administrasi keuangan kantor Kecamatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*. 7(1), 33-40. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Erlina., Rambe, O.S & Rasdianto (2015). *Akuntansi keuangan daerah berbasis arual*. Jakarta: Salemba Empat
- Fahmi, I. (2014) *Manajemen keuangan perusahaan dan pasar modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gie, The Liang (2009). *Administrasi perkantoran modern*. Yogyakarta: Liberty
- Gumanti, T.A. (2011). *Manajemen investasi-konsep, teori dan aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Irfani, A. S. (2020). *Manajemen keuangan dan bisnis: teori dan aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kamaludin & Indriyani. (2011). *Manajemen keuangan konsep dan dasar penerapannya*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kania, I., Ulumudin, A., & Akbar, G. G. (2020). Pengelolaan administrasi keuangan program alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmu Administrasi*. 11(1), 47-51. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Kasmir. (2008). *Analisis laporan keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Kaumbang, J., Pangemanan, S. S., & Wokas, H. R. (2016). Analisis penyusunan anggaran pada kantor Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado tahun anggaran 2014. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11(3). Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Lewar, M. V. N., Tokan, M. G. M., & Rangga, Y. D. P. (2023). Kinerja Keuangan pada Kantor Pusat KSP Kopdit Pintu Air Rotat Ditinjau dari ROI, ROA dan ROE. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(4), 1342-1351.
- Mendrofa, R., Bate'e, M. M., & Telaumbanua, Y. N. (2022). Analisis pengelolaan administrasi keuangan Pada Kantor Pengadilan Agama Gunungsitoli. *Jurnal Ilmiah Maksitek*. 7(3), 1-9. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Mohi, W. K., Alkatiri, R., Akbar, M. F., & Baruadi, I. S. (2020). Implementasi POAC fungsi manajemen pada administrasi keuangan di Kantor Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. *Economic, Business, Management, and Accounting Journal*. 17(2), 70-79. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Nazara, D. S. (2019). Peranan manajemen keuangan dalam pengelolaan anggaran pada Kantor Camat Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen PEMBNAS*. 6(1), 51-58. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Nurdiansyah, H. & Rahman., R., S. (2019). *Pengantar manajemen*. Yogyakarta: Diandra kreatif.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang *Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah* berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019.
- Purba, D. S., Kurniullah, A. Z., Banjarnahor, A. R., Revida, E., Purba, S., Purba, P. B., ... & Simarmata, J. (2021). *Manajemen usaha kecil dan menengah*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Purnomo, I. A., Sujalwo, M., & Nugroho, Y. S. (2015). *Sistem administrasi keuangan sekolah dengan menggunakan Java (Studi kasus: di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Program Studi Informatika Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*. 1(2), 85-98. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Raharjaputra. (2011). *Manajemen keuangan dan akuntansi*. Jakarta Selatan: Salemba empat.
- Rangga, Y. D. P., Herdi, H., Rengga, A., & Goo, E. E. K. (2020). Determination of budget amount using method of influence over time budget calculation (SILPA) of Sikka District government. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 4(2), 202-210. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.

- Realino, D., & Moko, W. (2021). The Effect of customer experiential quality on revisit intention with positive emotion and perceived value as mediation variables. *The International Journal of Social Sciences World (TIJOSSW)*, 3(1), 245-258.
- Realino, D., Gula, V. E., & Jelita, S. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Pada Mahasiswa Pengguna Ojek Konvensional). *Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset*, 1(4).
- Rudianto. (2009). *Penganggaran*. Jakarta: Erlangga
- Rukmini, M., Nuwa, C.A.W., Qosim, N., Suhartanta, S., Abdurohim., Ristiyana, R., M. Zahari Ms., Santoso, A., Santoso, R., Sharon, St.S., Luju, E., Sofyanty, D., & Samosir, M. S. (2022). *Implementasi pengelolaan keuangan daerah*. Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara.
- Shanti, Y. K. (2018). Analisis penerapan basis akrual atas standar akuntansi pemerintah No 71 dan dampaknya pada penyajian laporan keuangan (Studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Ciputat Timur). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*. 1(1), 43. Diakses dari <http://scholar.google.co.id>.
- Siagian, S. P. (2004). *Filsafat administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, U. (2009). *Studi tentang ilmu administrasi, konsep, teori dan dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sinurat, M. (2018) *Akuntansi keuangan daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2013). *Metodologi penelitian akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota IKAPI.
- Suparmoko. (2000). *Keuangan negara*. Yogyakarta: BPFE.
- Sutrisno. (2012). *Manajemen keuangan teori konsep dan aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Tokan, M. G. M., Pangastuti, D. A., & Apriyanto, G. (2021). The Influence of Accounting Understanding, Utilization of Information Technology, Competence of Human Resources and Internal Control Systems on the Quality of Financial Reports in Savings and Loan Cooperatives in Maumere–Sikka Regency-East Nusa Tenggara. *Journal of Research in Business and Management*
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*.
- Gula, V. E., & Mulyani, S. D. (2020, April). Pengaruh Capital Intensity Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance Dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-43).
- Jaeng, W. M. Y., Yuneti, K., Gula, V. E., & Rangga, Y. D. P. (2023). SOSIALISASI PEMBUKUAN SEDERHANA DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN BAGI SISWA DI SMAK FRATERAN MAUMERE. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 2839-2843.
- Gula, V. E., & Yuneti, K. (2023). Analisis Rasio Likuiditas dan Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Koperasi (Studi Kasus Pada KSP Kopdit Pintu Air

Tahun 2019–2021). *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset*, 1(4), 102-118.

Sujila, K., Prijati, P., & Santoso, B. H. (2023). The Effect Of Work Environment And Work Discipline On Employee Performance Through Emotional Intelligence. *JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES)*, 7(2), 511-517.

Bure, M. R., & Santoso, B. H. (2023). The Influence Of Board Members Competency, Public Accountability and Public Policy Transparency on Regional Financial Supervision Community Participation As A Mediation Variable. *JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES)*, 7(2), 537-541.